



---

**Inovasi Administratif dalam Sektor Publik  
(Studi tentang Inovasi  
Government Resourch Management System)**

***Administrative Innovation In The Public Sector  
(Study of Innovation  
Government Resources Management System)***

**Agus Widiyarta<sup>1\*</sup>, Moch. Rozzaq<sup>2)</sup>, Ahmad Irfan Muzakki<sup>3)</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Diterima: 18 Maret 2020; Disetujui: 09 April 2020; Dipublish: 10 April 2020

\*Corresponding Email: [agus\\_widiyarta.adneg@upniatim.ac.id](mailto:agus_widiyarta.adneg@upniatim.ac.id)

---

**Abstrak**

*Government Resourch Management System* merupakan sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai hilir (dalam konteks belanja), yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui klasifikasi tipologi inovasi *Government Resourch Management System* dalam konteks tipologi inovasi sektor publik. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menguraikan data secara teratur oleh objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi masuk dalam tipologi inovasi administratif yang berkaitan dengan proses perubahan dalam kebijakan. Pada konteks ini berhubungan dengan kebijakan perencanaan yang sering terjadi inkonsistensi antara yang direncanakan dan implementasi. Namun, inovasi *Government Resourch Management System* konsisten dengan perencanaan yang dibuat perangkat daerah Kota Surabaya dengan yang terjadi dilapangan.

**Kata kunci:** Inovasi Sektor Publik, Tipologi Inovasi Sektor Publik, *Government Resourch Management System*.

**Abstract**

*Government Resourch Management System* is an integrated government resource management system from upstream to downstream bureaucratic activities (in the context of spending), which has been developed by the Surabaya City Government to support regional financial management. This type of research is library research that aims to determine the classification of *Government Resourch Management System* typologies in the context of public sector innovation typologies. This research is descriptive which describes data regularly by the research object. The results showed that innovation is included in the typology of administrative innovation related to the process of change in policy. In this context related to planning policies that often occur inconsistencies between planned and implementation. However, the *Government Resource Management System* innovation is consistent with the planning made by the Surabaya City apparatus with those occurring in the field.

**Keywords:** Public Sector Innovation, Typology of Public Sector Innovation, *Government Resource Management System*.

**How to Cite:** (2020). Inovasi Administratif dalam Sektor Publik (Studi tentang Inovasi *Government Resourch Management System*), *Jurnal Sosial, Ekonomi, dan Politik (JSEP)* 1(1):

---

## PENDAHULUAN

Di era modernisasi yang menuntut percepatan perubahan mulai dari sistem hingga prosedur dan pemerintah sebagai subjek penyelenggara negara dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meski kenyataan yang terjadi dilapangan pemerintah masih tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Hal itu terjadi karena adanya patologi yang masuk ke dalam sistem pemerintah maupun human error yang sering terjadi menyebabkan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi terhambat. Melihat kondisi yang terjadi pemerintah perlu mengubah diri mereka menjadi lebih baik, perubahan merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan organisasi. Bagi organisasi cara yang dapat mereka lakukan adalah dengan melakukan inovasi (Ridlowi & Himam, 2018).

Inovasi perlu dilakukan oleh organisasi yang hendak mengubah jati diri mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya perubahan ini juga untuk memperbaiki kerusakan dari sistem, prosedur maupun SDM di dalamnya sehingga bagian dalam organisasi dapat berjalan lebih teratur dan dapat meningkatkan kualitas organisasi. Inovasi organisasi merupakan output dari penciptaan pengetahuan dan berbagi pengetahuan antara anggota organisasi dalam pemerintah daerah tentang kebutuhan masyarakat (Nurmadi, 2006). Melihat kebutuhan akan inovasi di wilayah pemerintah terutama untuk pemerintah daerah setempat membuat presiden memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, regulasi tersebut menginstruksikan inovasi/pembaharuan di sekitar pemerintah daerah, hal ini menjadi payung hukum bagi kepala daerah untuk menciptakan inovasi bagi kelangsungan proses penyelenggaraan

birokrasi dalam prakteknya terdapat banyak bentuk/jenis inovasi di sektor publik yang dikembangkan mulai dari pemberdayaan sosial, pelayanan publik dan penggunaan sarana teknologi. Banyak badan mulai dari pemerintah, organisasi, dan perusahaan privat di dunia menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung bagi setiap proses program yang mereka lakukan, dalam perspektif pemerintah dikenal dengan e-government. Menurut Nur (2014) e-government merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Manfaat penggunaan e-government tentu sangat mengubah budaya pemerintah dalam pelayanan publik yang lebih baik. Perubahan dengan adanya e-government ini juga mempengaruhi bagian-bagian internal pemerintah dan lingkungan yang ada disekitarnya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya mengembangkan hal ini sebagai bagian dari inovasi ke dalam sistem penyusunan anggaran belanja dan pengadaan barang/jasa yang berbentuk e-government yang dinamakan *Government Resourch Management System*.

*Government Resourch Management System* didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah (dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2010). *Government Resourch Management* sendiri terintegrasi ke dalam 6 aplikasi yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain meliputi ; e-budgeting, e-project planning, e-procument, e-delivery, e-controlling, dan

e-performance. Hal yang menarik dari *Government Resourch Management System* ini adalah dengan adanya sistem ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta efisiensi anggaran yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah baik dalam skala kecil maupun besar. Dengan melihat produk inovasi *Government Resourch Management System* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentu menarik untuk dianalisis dan dieksplorasi lebih mendalam. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang pendapat akademis mengenai inovasi sektor publik serta menyediakan tinjauan reflektif terhadap program *Government Resourch Management System* yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dilihat dari perspektif konseptual tipologi inovasi sektor publik.

## **KAJIAN TEORI**

### **Inovasi Sektor Publik**

Setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu melakukan inovasi baik dalam hal pengembangan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Menurut Atthahara (2018), menjelaskan bahwa inovasi merupakan suatu terobosan jenis pemikiran yg merupakan ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual. Konsep inovasi sektor publik merupakan aspek dalam perubahan yang ada dalam organisasi sektor publik. Mulgan menyatakan bahwa inovasi sektor publik merupakan ide atau gagasan baru yang dapat diterapkan di sektor publik dan ide-ide tersebut hendaklah merupakan ide yang baru minimum sebagiannya baru dan berguna (Mulgan, 2007). Dalam menciptakan inovasi sektor publik tentunya ada proses yang terlibat baik itu proses langsung dan tidak langsung. Ancok (2012), menyederhanakan proses inovasi dalam tiga langkah utama yaitu:

memproduksi gagasan, mengevaluasi gagasan, dan mengimplementasikan gagasan. Proses ini juga tidak terlepas dari stakeholder sebagai pelaku/inovator yang menciptakan inovasi organisasi di sektor publik. Memproduksi gagasan berarti memunculkan ide tentang inovasi yang akan diciptakan dalam beberapa model pendekatan bisa jadi membuat rancangan atau blueprint dari inovasi tersebut.

### **Tipologi Inovasi Sektor Publik**

Inovasi sektor publik cenderung bersifat jamak yang mengartikan bahwa wujud dari inovasi sektor publik itu sendiri bisa beraneka ragam dan bentuk. Pemerintah selaku organisasi sektor publik mengembangkan inovasi ini untuk memperbaiki permasalahan yang ada di dalam organisasi baik pada skala kecil maupun besar. Inovasi sektor publik dapat dielaborasi dengan konsep tipologi inovasi sektor publik yang menjadikan bentuk inovasi bersifat jamak, dikutip dari Halvorsen, Hauknes, Miles, & Roste (2005), terdapat 6 tipologi inovasi sektor publik.

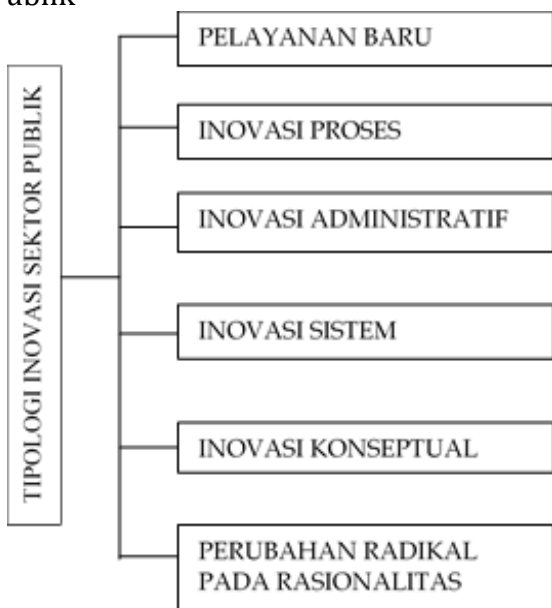
1. Penciptaan pelayanan yang baru atau pengembangan sebuah pelayanan. Dapat dicontohkan dengan pengembangan layanan tilang online;
2. Inovasi proses yang menekankan pada perubahan cara dalam menghasilkan sebuah pelayanan atau produk tertentu. Dapat dicontohkan dengan penggunaan antrian online di rumah sakit atau puskesmas;
3. Inovasi administratif yang memfokuskan pada perubahan kebijakan. Dapat dicontohkan dengan adanya perubahan penyusunan anggaran belanja yang sebelumnya bersifat manual menjadi berbasis digital;
4. Inovasi sistem yaitu perubahan pada struktur organisasi atau merubah cara kerjasama dan interaksi di dalam organisasi. Dapat dicontohkan dengan perampingan struktur

organisasi melalui pelimpahan wewenang.

5. Inovasi konseptual yakni perubahan pada cara pandang dari aktor yang terlibat sehingga lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dapat dicontohkan dengan penataan PKL dalam berjualan yang seringkali tidak tertata rapi.
6. Perubahan radikal pada rasionalitas yaitu merubah cara pandang dari pemberi pelayanan. Dapat dicontohkan dengan pemanfaatan penganggaran berbasis kinerja untuk memaksimalkan kinerja birokrat.

Tipologi inovasi sektor publik menjadi salah satu penekanan dalam memaksimalkan inovasi di lingkungan sektor publik agar dapat memberikan fasilitas yang mendukung setiap program atau kinerja yang dilakukan oleh birokrat agar bisa bekerja secara akuntabel, transparan dan efektif. Berdasarkan paparan diatas dapat kita abstraksikan tipologi inovasi sektor publik ini ke dalam model seperti yang ada di bawah ini.

Gambar 1 Model Tipologi Inovasi Sektor Publik



Sumber : diinterpretasikan dari tulisan Halvorsen, Hauknes, Miles, & Roste (2005).

Perbedaan dari tipologi inovasi sektor publik ini terletak pada tujuan dan bentuk dari inovasi tersebut. Tipologi inovasi sektor publik menjadi landasan dalam mengukur keberhasilan inovasi yang dilakukan (Basuki, 2018). Pada konteks inovasi ini berkaitan dengan *Government Resourch Management System* yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran belanja perangkat daerah.

### Pelayanan Publik

Menurut Kurniawan (2017), Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Sehingga Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan.

Sedangkan berdasarkan pengertian menurut Marom (2015) bahwa pelayanan publik merupakan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah menurut level dan jenis pelayanan yang diberikan. Dimana segala kegiatan pelayanan tersebut dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### E-Government

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kebijakan pemerintah dapat ditunjukkan dengan adanya e-government yang merupakan sebuah

kebijakan baru dimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani penduduknya melalui media telepon, faximile, atau e-mail/internet (Almarabeh, 2010). Dalam implementasinya, *e-government* sendiri terbagi ke dalam beberapa bentuk/jenis antara lain:

1. G2G (*government to government*)  
Kebutuhan untuk berinteraksi antar pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara.
2. G2B (*government to business*)  
Dalam melakukan aktivitas bisnis, perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang mendukung business process perusahaan tersebut yang dimiliki oleh pemerintah.
3. G2C (*government to civil*)  
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).
4. G2E (*government to employees*)  
Aplikasi *e-Government* juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan publik agar memudahkan warga negara dalam mendapatkan pelayanan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau kajian literatur yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik, serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Syaodih, 2009).

Fokus dalam penelitian ini mengkaji tentang teori, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi tipologi inovasi sektor publik yakni *Government Resourch Management System* yang menjadi inovasi terbaru dari Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan anggaran belanja. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Government Resourch Management System* merupakan sebagai salah satu bentuk sistem *e-government* yang dibuat dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya sejak tahun 2007 dan telah digunakan dalam proses penyusunan anggaran belanja serta inovasi ini merupakan salah satu bentuk inovasi administratif dalam perspektif tipologi inovasi sektor publik. Sistem *Government Resources Management System* terdiri dari 6 aplikasi yang saling berkaitan, antara lain:

1. *e-budgeting*, adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
2. *e-project planning*, adalah sistem yang digunakan untuk memudahkan perangkat daerah dalam merencanakan pemaketan pekerjaan dan untuk membuat penyerapan kegiatan yang telah didapatkan persetujuan alokasi anggaran.
3. *e-procurement*, adalah sistem lelang sebuah proyek yang dilakukan melalui internet secara tender atau perorangan.
4. *e-delivery*, adalah sistem yang digunakan untuk mendukung administrasi kegiatan yang didalamnya termasuk program

komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa, realisasi belanja penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan, dan untuk update progress tiap pekerjaan.

5. *e-controlling*, adalah sistem yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi antara realisasi anggaran terhadap perencanaan anggaran dimasing-masing SKPD/unit kerja.
6. *e-performance*, adalah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan landasan hukum Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknik Pemberian Uang Kinerja Pada Belanja Langsung.

*Government Resources Management System* sendiri memiliki beberapa tujuan yang sudah ditetapkan. Pertama, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan diterapkannya sistem *Government Resources Management System*, pengadaan barang yang dilakukan pemerintah dapat diketahui sebenarnya tanpa ada mark-up data dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memudahkan informasi atas keadaan atau kondisi perkembangan pelaksanaan fisik pekerjaan dan permasalahannya. Ketiga, memudahkan mengetahui akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang dalam pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan (dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2010).

Sistem ini termasuk ke dalam jenis ERP (*Enterprise Resourch Planning*) yang sedang diminati oleh perusahaan di Indonesia saat ini. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua

departemen dan fungsi perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari aspek penjualan, HRD, produksi atau keuangan (Poernomo, 2011). Sistem ini mengkoordinir seluruh komponen dalam satu tempat dan dapat diakses oleh seluruh orang, dengan pemanfaatan dari sistem ini tentu saja memberikan kemudahan secara langsung dan kenyamanan dalam melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan baik dari *tingkat low manager* hingga *top manager*. Pelayanan dalam satu sistem ini juga dapat mengurangi ketidakonsistenan antara satu departemen dengan departemen lainnya sehingga diharapkan sistem ini mampu meningkatkan keterbukaan/transparansi baik bagi karyawan yang bertugas hingga atasan.

*Government Resourch Management System* termasuk dalam pengaplikasian e-government G2G dan G2E. Karena didasarkan pada operasional sistem ini yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di wilayah Pemerintah Kota Surabaya. G2G, terdiri dari *e-bugdeting*, *e-project planning*, *e-procument*, *e-delivery* dan *e-controlling*. Sedangkan G2E dalam sistem ini terdapat pada aplikasi *e-performance*. Seperti dalam tinjauan pustaka mengenai *e-government* bahwa G2G berkaitan dengan kebutuhan interaksi antar organisasi perangkat daerah, dapat dikatakan dalam penyusunan dan pengadaan barang/jasa tentu saja melibatkan banyak stakeholder sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar proses pemerintahan bisa berjalan optimal dan efisien. Dalam penyusunan anggaran belanja, perangkat daerah harus mengikuti prinsip yang ada dalam penggunaan anggaran publik. Menurut Handayani (2012) terdapat 6 prinsip yang harus ada dalam proses penyusunan anggaran antara lain:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.

2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah (*work better and cost less*).
3. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
4. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

*Government Resourch Management System* sudah mewakili semua prinsip penyusunan anggaran publik, keseluruhan proses dijalankan secara transparan dan melalui pendekatan ukuran kinerja sehingga anggaran dapat terserap dengan baik. Secara khusus *Government Resourch Management System* memberikan kemudahan bagi perangkat daerah dalam menyusun anggaran belanja yang sebelumnya dikerjakan secara manual, berkat adanya inovasi ini penyusunan anggaran belanja dapat berjalan lebih baik daripada manual. Beberapa perbandingan yang membedakan proses penyusunan anggaran belanja secara manual dengan digital, dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Penyusunan Anggaran

Perbandingan	Manual	Digital
Pengusulan	Hard copy lewat panduan	Entri lewat aplikasi yang ada
Proses pengusulan	Ribet dan lama	Dipantau dari

		aplikasi dan dapat dirubah
Perubahan pengusulan	Bentuk hardcopy	Entri lewat aplikasi
Penelitian usulan	Mengecek per usulan secara hardcopy	Sorting lewat aplikasi
Laporan	Lama dan susah	Sesuai permintaan
Data penyusunan anggaran	Terbatas di kantor	Dapat diakses lewat internet

Sumber : Pemkot Surabaya, 2020

Dari perbandingan diatas menunjukkan bahwa penyusunan dengan menggunakan aplikasi/digital dalam proses penyusunan anggaran belanja perangkat daerah dapat diakses dengan mudah melalui internet yang menghubungkan semua aplikasi pada koridor yang sama dan perangkat daerah bisa bekerja lebih cepat serta transparan terhadap anggaran yang digunakan.

*Government Resourch Management System* menjadi model inovasi baru yang berbentuk inovasi administratif bagi penyusunan anggaran belanja daerah yang seringkali terjadi masalah atau sering dihindangi oleh patologi birokrasi. Masalah penganggaran di daerah pada umumnya terjadi ketidakkonsistenan dengan berbagai produk perencanaan yang dipersiapkan sehingga seringkali membuat perencanaan tidak berjalan optimal (Utari, 2009). Ketidakonsistenan ini dapat terjadi lantaran perencanaan yang sudah dibuat dan pengimplementasian yang dilakukan terasa sangat berbeda, oleh karena itu perlu adanya kebijakan berwujud sistem yang akuntabel dan transparan dalam memproses anggaran publik. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan

uang publik (Sari, 2016). Uang publik berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, pemerintah selaku subjek yang menggunakan uang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan uang rakyat yang mereka gunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan bentuk penyusunan anggaran belanja daerah dan pengadaan barang/jasa secara manual, dengan sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya ini dapat menekan pengeluaran yang cukup signifikan. Dikutip dari laman beritasurabaya.net (2012) sistem manajemen pemerintah berbasis GRMS (*Government Resources Management System*), membuat kinerja di lingkup Pemerintah Kota Surabaya lebih efektif dan mudah terpantau karena semua serba elektronik. Sistem ini juga mampu memangkas potensi terjadinya tindak korupsi atau kongkalikong hingga 80 persen. Mengurangi tindak korupsi menjadi komponen dari reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dalam kurun waktu 5 tahun semenjak diberlakukannya sistem *Government Resourch Management System* pada 2007 lalu dalam penyusunan anggaran belanja perangkat daerah menunjukkan serapan anggaran yang baik, bahkan setiap tahun serapan anggaran naik stabil, berikut ini tabel yang menunjukkan capaian realisasi serapan anggaran APBD Kota Surabaya sejak 2007-2011.

Tabel 2.1 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2007-2011

No	Tahun	Pendapatan	Belanja personalia dan barang/jasa	Serapan
1	2007	2.029.556.867.569	837.699.483.540	41,27%
2	2008	2.366.640.310.450	1.683.204.681.106	71,12%
3	2009	2.785.284.667.316	2.073.466.575.063	74,44%
4	2010	2.542.848.819.977	2.281.893.691.395	89,73%
5	2011	3.759.632.599.000	2.880.103.730.000	76,72%

Sumber : Surabaya dalam angka, diolah peneliti, 2020

Dari data tabel diatas yang telah peneliti olah berdasarkan sumber Surabaya dalam angka pada tahun 2007 s/d 2011 menjabarkan bahwa kenaikan signifikan anggaran yang digunakan dalam penyusunan anggaran belanja berjalan efektif dengan serapan anggaran yang lebih dari 70% terserap baik pada belanja personalia dan barang/jasa. Tentu saja capaian ini juga tak luput dari penggunaan *Government Resourch Management System* dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran belanja organisasi perangkat daerah. Organisasi perlu untuk melakukan inovasi, begitu pun dengan sektor publik yang berjalan sangat dinamis. Organisasi sektor publik lebih kompleks dan homogen dalam pelaksanaan fungsi mereka (Halim dan Kusufi, 2013). Inovasi pada sektor publik lebih ditekankan pada aspek perbaikan yang dihasilkan dari kegiatan inovasi tersebut, yaitu pemerintah mampu memberikan pelayanan publik secara lebih efektif, efisien dan berkualitas, murah dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi di sektor publik merupakan salah satu jalan atau bahkan "*breakthrough*" untuk mengatasi kemacetan dan kebutuhan organisasi di sektor publik (Eldo & Mutiarin, 2019). Menurut ulasan yang sudah dikemukakan menunjukkan bahwa *Government Resourch Management System* masuk dalam jenis tipologi inovasi administratif karena dengan adanya sistem ini merubah fokus kebijakan penyusunan anggaran yang sebelumnya bersifat manual menjadi digital serta memperbaiki beberapa kendala yang terjadi antara bagian perencanaan dan implementasi di lapangan. Perubahan ini juga didukung dengan peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas dari perangkat daerah dalam menyusun anggaran sesuai dengan yang direncanakan sehingga pembangunan dan operasional pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai target yang ditetapkan.



Tipologi inovasi administratif berkaitan dengan perubahan kebijakan yang dinilai kurang optimal dan efisiensi. Perubahan kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan seluruh aspek yang ada di wilayah pemerintah baik itu pusat maupun daerah. Inovasi ini menjadi pembaharuan dalam kebijakan pemerintah baik tingkat pusat/daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang dinilai belum dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam kasus ini berkaitan dengan penyusunan anggaran belanja yang kurang transparan dan akuntabel terhadap proses pembangunan. *Government Resourch Management System* ini memberikan perubahan dalam proses penyusunan anggaran yang sering kali kurang akuntabel dan kurang transparan bagi perangkat daerah. Inovasi *Government Resourch Management System* bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat daerah dan mengoptimalkan penggunaan APBD Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga ingin mengaktualisasikan manfaat dari penggunaan e-government dilingkungan pemerintah daerah, hal ini juga dimaksudkan untuk menunjang kinerja birokrat yang bertugas. Penggunaan e-government merupakan terobosan penting untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah (Rahman, 2011). Jadi penggunaan *e-government* sangatlah diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil beberapa poin yang menunjukkan bahwa *Government Resourch Management System* dikatakan sebagai inovasi administratif. Pertama, penyusunan anggaran belanja merupakan kebijakan. Kedua, penyusunan manual berubah menjadi digital termasuk inovasi. Ketiga, Menekankan transparan, akuntabel dan efisiensi anggaran yang digunakan. Keempat, menyelesaikan permasalahan penyusunan anggaran belanja yang

seringkali tidak sebanding dengan realitasnya.

## SIMPULAN

Konsep inovasi berhubungan dengan sesuatu yang baru dan belum pernah diterapkan. Inovasi dipahami sebagai kreasi dalam kebaruan baik pada aspek input, proses maupun output dan outcome bagi organisasi dilingkup publik seperti pemerintah. Inovasi sektor publik merupakan perubahan yang berorientasi pada kebaruan serta diimplementasikan dalam merubah, membenahi dan meningkatkan kualitas masukan, proses, penyampaian dan produk barang dan jasa di sektor publik *Government Resourch Management System* termasuk tipologi inovasi administratif yang fokus pada perubahan kebijakan yang belum optimal. Perubahan ini didasarkan pada perubahan proses anggaran yang manual menjadi berbasis digital dan kondisi proses penyusunan anggaran yang sering terjadi inkonsistensi antara perencanaan dengan implementasi yang terjadi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almarabeh, T. 2014. *A General Framework for EGovernment: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success*. European Journal of Scientific Research, Vol 39 (1), p 29-42.
- Ancok, D. (2012). *Psikologi kepemimpinan & inovasi*. Jakarta: Erlangga.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-77.
- Basuki, Y., Kasmad, R., & Nasrulhaq, N. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan*, 2(3), 207-216.
- Dokumen Bina Program Pemkot Surabaya. 2005.-----. 2010.
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan "Kumis MbahTejo" di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156.
- Handayani, B. D. (2012). Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas Apbd Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1), 31-40.

- Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Roste, R. (2005). *Innovation in the Public Sector: on the Differences between Public and Private Sector Innovation*. Oslo: Publin.
- Halim, A., dan S. Kusufi. (2013). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrajit, R. E. (2005). *Electronic Government in Action*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia*, 10(3), 569–586.
- Marom, A. (2015). Inovasi Birokrasi Pelayanan Publik Bidang Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Kudus. *Gema Publica*, 1(1), 45.
- Mulgan. (2007). Ready or Not? Taking Innovation in the Public Sector Seriously. Dalam *NESTA Provocation*
- Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Nur, E. (2014). Penerapan E-Government Publik Pada Setiap Skpd Berbasis Pelayanan Di Kota Palu. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 18(3), 265–280
- Nurmadi A. (2006). Inovasi Organisasi Publik : Implementasi *Knowledge Management* Mendorong Inovasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, Vol. 10, pp. 133–148.
- Poernomo, Yoeda Hari. (2011). E-Business: Enterprise Resource Planning (ERP) (online)
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Jaminan Kepala Daerah Berinovasi
- Rahman, A. (2011). Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi Di Kabupaten Sleman Dan Kabupaten Tulungagung. *Jaai*, 15(2), 190–203.
- Ridlowi, R., & Himam, F. (2018). Inovasi pada Organisasi Pemerintah: Tahapan dan Dinamika. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 2(1), 22.
- Sari, E. N. (2016). Penyusunan Anggaran Dalam Era New Public Management: Implementasinya Di Indonesia Vol 10 No .2 / September 2016. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(September), 119–135.
- Surabaya dalam Angka (2007). Pemerintah Daerah Kota Surabaya
- Surabaya dalam Angka (2008). Pemerintah Daerah Kota Surabaya
- Surabaya dalam Angka (2009). Pemerintah Daerah Kota Surabaya
- Surabaya dalam Angka (2010). Pemerintah Daerah Kota Surabaya
- Surabaya dalam Angka (2011). Pemerintah Daerah Kota Surabaya
- Utari, N. (2009). Tesis : *Studi Fenomenologis Tentang Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro [http://beritasurabaya.net/index\\_sub.php?category=4&id=7871](http://beritasurabaya.net/index_sub.php?category=4&id=7871), diakses pada 29 Februari 2020 <https://slideplayer.info/slide/14180848/>. Diakses pada 29 Februari 2020